

Received: March 2026

Accepted: March 2026

Published: May 2026

Analisis Kebijakan dalam Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Perspektif Pemerataan Mutu

Sarah Puspita, Mauliatu Rohmah, Qomaruddin

Universitas Qomaruddin Gresik, Universitas Qomaruddin Gresik, Universitas Qomaruddin Gresik

Email: sarahpuspita68192@gmail.com, melialya16@gmail.com, uddinqomar@gmail.com

Abstract

Education is a fundamental right of every citizen guaranteed in the Indonesian constitution, particularly in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 31. The Indonesian government has issued various policies to improve the quality of primary and secondary education while ensuring equitable access and quality across all regions. Nevertheless, the disparity in education quality between urban and rural areas, as well as between western and eastern regions of Indonesia, remains a serious challenge. This article aims to analyze primary and secondary education policies from the perspective of quality equity, identify factors hindering policy implementation, and formulate strategic recommendations for improvement. The study uses a literature review method with a descriptive-analytical approach through the examination of regulations, government reports, and previous research findings. The analysis results show that policies such as the School Operational Assistance (BOS), the Indonesia Smart Program (PIP), and the Merdeka Curriculum have improved access to education and learning flexibility. However, disparities in teacher distribution, limited infrastructure, as well as weak oversight and policy evaluation, remain major obstacles in equalizing the quality of education.

Keywords: Education Policy, Quality Equalization, Primary Education, Secondary Education

Abstrak

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin dalam konstitusi Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah sekaligus memastikan pemerataan akses dan kualitas di seluruh wilayah. Meskipun demikian, kesenjangan mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antara kawasan barat dan timur Indonesia masih menjadi tantangan serius. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan dasar dan menengah dalam perspektif pemerataan mutu, mengidentifikasi faktor penghambat implementasi kebijakan, serta

merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian terhadap regulasi, laporan pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), dan Kurikulum Merdeka telah meningkatkan akses pendidikan dan fleksibilitas pembelajaran. Namun demikian, ketimpangan distribusi guru, keterbatasan sarana prasarana, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi kebijakan masih menjadi kendala utama dalam pemerataan mutu pendidikan.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Pemerataan Mutu, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah

Pendahuluan

Pendidikan menjadi salah satu kunci dalam pembangunan sumber daya manusia, yaitu membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Syamsurijal, 2024). Dalam sistem pendidikan nasional, jenjang ini menjadi fondasi pembentukan karakter, literasi, numerasi, serta kompetensi abad ke-21. Secara normatif, hak atas pendidikan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Selain itu, kebijakan desentralisasi pendidikan pasca reformasi memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan. Namun, desentralisasi juga memunculkan tantangan baru, terutama

terkait disparitas kapasitas fiskal dan manajerial antar daerah. Data berbagai laporan nasional menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam capaian mutu pendidikan antarprovinsi. Sekolah di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) sering menghadapi keterbatasan guru, fasilitas pembelajaran, serta akses terhadap teknologi informasi. Oleh karena itu, analisis kebijakan pendidikan dalam perspektif pemerataan mutu menjadi penting guna menilai sejauh mana kebijakan yang ada mampu menjawab persoalan ketimpangan tersebut. inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan pemerataan mutu pendidikan di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor struktural maupun kultural. Penelitian (Suryadi.Prof, 2021), misalnya, mengkaji implementasi desentralisasi pendidikan dan menemukan bahwa pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah belum diimbangi dengan kesiapan

kapasitas kelembagaan. Akibatnya, terjadi variasi kualitas kebijakan di tingkat daerah, terutama dalam perencanaan anggaran, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Hal ini menyebabkan ketimpangan mutu pendidikan antar wilayah tetap tinggi meskipun kebijakan desentralisasi telah berjalan cukup lama. Penelitian (A.Lestari, 2023) khusus mengkaji kesenjangan akses teknologi pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah 3T. Temuannya menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur digital, seperti jaringan internet dan perangkat pembelajaran berbasis teknologi, menyebabkan peserta didik di daerah 3T tertinggal dalam penguasaan kompetensi abad ke-21, terutama literasi digital dan kemampuan berpikir kritis. Hal ini semakin terlihat pada masa pembelajaran daring, di mana kesenjangan akses semakin memperlebar disparitas hasil belajar. Sementara itu, (Rahman, 2022) meneliti distribusi dan kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan distribusi guru masih menjadi persoalan utama, di mana daerah perkotaan cenderung kelebihan guru, sedangkan daerah terpencil mengalami kekurangan, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Selain itu, rendahnya insentif dan minimnya dukungan profesional bagi guru di daerah 3T turut memengaruhi kinerja dan motivasi mereka dalam melaksanakan pembelajaran.

Penelitian (Hidayat, 2024) melengkapi temuan-temuan tersebut dengan menyoroti aspek implementasi kebijakan pendidikan. Ia menemukan bahwa banyak kebijakan pendidikan yang dirancang secara top-down kurang mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik lokal daerah. Akibatnya, program-program yang diimplementasikan seringkali tidak efektif atau tidak berkelanjutan karena tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan, terutama di daerah dengan keterbatasan sumber daya. Berdasarkan elaborasi penelitian-penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa ketimpangan mutu pendidikan tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara kapasitas fiskal daerah, kualitas tata kelola pendidikan, distribusi sumber daya manusia, serta akses terhadap teknologi. Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih membahas faktor-faktor tersebut secara parsial dan belum mengintegrasikannya dalam satu kerangka analisis kebijakan yang komprehensif.

Oleh karena itu, novelty (kebaruan) dalam penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan berbagai dimensi tersebut dalam satu analisis kebijakan pendidikan yang holistik, dengan fokus khusus pada daerah 3T. Penelitian ini tidak hanya menganalisis isi kebijakan (policy content), tetapi juga menelaah konteks implementasi (policy context) yang meliputi kapasitas

fiskal daerah, kesiapan kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi pola hubungan antar faktor tersebut dalam memengaruhi pemerataan mutu pendidikan, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual, adaptif, dan berorientasi pada keadilan pendidikan secara berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Metode ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam tentang analisis kebijakan pendidikan pada sekolah dasar dan menengah dalam perspektif pemerataan mutu dengan menggunakan literatur yang relevan sebagai sumber data, dan menghasilkan data berupa kata-kata atau deskripsi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan sesuai dengan topik penelitian. Kemudian data tersebut dikumpulkan melalui sumber bacaan berupa buku dan juga artikel ilmiah. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan menyimpulkan informasi yang telah didapatkan dari berbagai sumber bacaan untuk mendapatkan pemahaman tentang analisis kebijakan pendidikan pada sekolah dasar dan menengah

Hasil dan Pembahasan

Analisis Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Perspektif Pemerataan Mutu

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai regulasi pendidikan, laporan evaluasi kebijakan, serta kajian empiris yang relevan, ditemukan beberapa temuan utama terkait pemerataan mutu pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.

1. Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berkontribusi dalam mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh peserta didik, sehingga mampu meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan menengah pertama. Sekolah yang menerima dana BOS secara konsisten dapat mempertahankan operasional pembelajaran tanpa membebani siswa dengan pungutan tambahan yang signifikan (Aniza, 2023). Sementara itu, Program Indonesia Pintar (PIP) berkontribusi dalam membantu siswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah melalui bantuan langsung yang diterima peserta didik.

2. Ketimpangan Mutu Antar wilayah

Meskipun akses meningkat, hasil

analisis menunjukkan bahwa mutu pendidikan belum merata. Sekolah di wilayah perkotaan cenderung memiliki:

- a. Guru dengan kualifikasi akademik lebih tinggi
- b. Akses terhadap pelatihan profesional yang lebih intensif
- c. Fasilitas pembelajaran yang lebih lengkap
- d. Dukungan teknologi yang memadai

Sebaliknya, sekolah di daerah 3T masih menghadapi kekurangan guru mata pelajaran tertentu, keterbatasan ruang kelas layak, serta minimnya akses internet. Kesenjangan layanan pendidikan antara sekolah di perkotaan dan daerah 3T sangat nyata, terutama terlihat dalam hal fasilitas sekolah, jumlah dan kualitas guru, akses terhadap teknologi pendidikan, dan metode pembelajaran yang digunakan. Di mana sekolah perkotaan memiliki kondisi lebih memadai dibandingkan dengan sekolah di daerah 3T yang sering kekurangan berbagai sumber daya pendidikan (*Rizki Ananda Dkk*, 2025)

3. Implementasi Kurikulum yang Belum Seragam

Implementasi Kurikulum Merdeka menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar daerah. Sekolah dengan sumber daya

manusia yang memadai mampu mengembangkan pembelajaran berbasis proyek secara optimal. Namun, sekolah dengan keterbatasan tenaga pendidik dan fasilitas mengalami kesulitan dalam penerapan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel dan inovatif. Salah satu kendala utama dalam penerapan Kurikulum Merdeka adalah kesenjangan infrastruktur dan sumber daya pendidikan di berbagai daerah. Sekolah-sekolah di wilayah perkotaan cenderung lebih siap karena memiliki fasilitas memadai seperti lab, perpustakaan digital, dan teknologi pendukung pembelajaran. Sebaliknya, sekolah di daerah terpencil mengalami keterbatasan fasilitas dan akses internet, serta jumlah guru yang kompeten membimbing pembelajaran berbasis proyek (Syafriani et al., 2025)

4. Kesenjangan Digital dalam Transformasi Pendidikan

Transformasi digital pendidikan memperlihatkan adanya digital divide (kesenjangan digital). Sekolah di wilayah maju relatif lebih siap mengadopsi platform pembelajaran digital, sementara sekolah di daerah tertinggal masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar pembelajaran tatap muka. Penelitian menunjukkan bahwa transformasi digital pendidikan di Indonesia memperlihatkan adanya kesenjangan digital yang signifikan, di mana sekolah di wilayah

maju lebih siap mengadopsi teknologi pembelajaran digital, sementara sekolah di daerah 3T masih terbatas oleh infrastruktur teknologi, perangkat, dan kompetensi digital yang rendah sehingga berdampak pada akses dan kualitas pembelajaran. (Farhatin, 2025)

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik dapat dipahami sebagai segala bentuk pilihan pemerintah, baik berupa tindakan maupun keputusan untuk tidak mengambil tindakan. Pengertian ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya terbatas pada regulasi atau aturan tertulis, tetapi juga mencakup sikap dan keputusan strategis pemerintah dalam merespons suatu persoalan. Dalam bidang pendidikan, kebijakan tidak sekadar diwujudkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan formal, melainkan juga tercermin dalam praktik pengelolaan sumber daya, pengalokasian anggaran, serta penyelenggaraan layanan pendidikan (Herdiana et al., 2017). Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pendidikan sangat bergantung pada keselarasan antara proses perumusan kebijakan dan implementasinya di tingkat pelaksanaan.

"Pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap efektifitas implementasi program bantuan operasional sekolah pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri." *The Indonesian Journal of Public Administration*

(IJPA) ((Mening subekti.dkk, 2017) Apabila dikaitkan dengan kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia, keempat faktor tersebut menjadi sangat penting untuk memahami berbagai tantangan dalam implementasi kebijakan. Faktor komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, serta struktur birokrasi dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan. Ketidakseimbangan atau kelemahan pada salah satu faktor tersebut dapat menjadi penyebab belum optimalnya pemerataan mutu pendidikan di berbagai daerah.

1. Pemerataan Mutu dalam Perspektif Keadilan Pendidikan

Berdasarkan teori keadilan sosial yang dikemukakan oleh John Rawls, keadilan menuntut adanya perhatian khusus terhadap kelompok yang berada pada posisi paling tidak diuntungkan (the least advantaged). Gagasan ini menekankan bahwa distribusi manfaat sosial seharusnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan pihak yang paling lemah. Dalam konteks pemerataan mutu pendidikan, prinsip tersebut sangat relevan terutama bagi wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Dengan demikian, kebijakan pendidikan idealnya bersifat afirmatif, yakni memberikan prioritas dan dukungan yang lebih besar kepada daerah-daerah yang menghadapi keterbatasan

sarana, prasarana, maupun sumber daya manusia. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa walaupun program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) telah berkontribusi dalam memperluas akses pendidikan, kebijakan afirmatif yang berorientasi pada peningkatan mutu belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Sekolah-sekolah di wilayah yang relatif maju masih menunjukkan perkembangan yang lebih pesat dibandingkan dengan sekolah di daerah terpencil. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya kesenjangan dalam kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, serta dukungan fasilitas pendidikan yang belum merata

2. Distribusi Guru sebagai Determinan Mutu

Menurut Linda Darling-Hammond, mutu guru merupakan faktor sekolah yang memiliki pengaruh paling besar terhadap pencapaian hasil belajar peserta didik. Pernyataan ini menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia dalam pendidikan memegang peranan yang sangat strategis. Tanpa adanya pemerataan distribusi guru yang kompeten dan profesional, kebijakan di bidang kurikulum maupun pembiayaan pendidikan tidak akan memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan (Iqbal Baihaqi, 2025) Ditinjau

dari kondisi Indonesia, ketimpangan distribusi tenaga pendidik masih menjadi persoalan yang signifikan. Wilayah perkotaan umumnya memiliki guru dengan kualifikasi akademik dan kompetensi profesional yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah terpencil. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerataan mutu perlu lebih diarahkan pada upaya redistribusi guru serta penguatan kapasitas dan kompetensi pendidik di wilayah yang masih mengalami keterbatasan.

3. Implementasi Kebijakan dalam Sistem Desentralisasi

Menurut Merilee S. Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan itu sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh konteks politik dan administratif di tingkat lokal. Artinya, dinamika kekuasaan, kapasitas birokrasi, serta kondisi kelembagaan di daerah turut menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Dalam sistem desentralisasi pendidikan di Indonesia, pemerintah daerah memang diberikan kewenangan yang cukup luas dalam pengelolaan pendidikan. Namun demikian, tidak seluruh daerah memiliki kemampuan manajerial dan kapasitas fiskal yang setara, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan variasi dalam kualitas implementasi kebijakan pendidikan di berbagai wilayah. (Nurindah et al., 2024)

Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan kebijakan pendidikan yang tidak berjalan secara seragam antarwilayah. Daerah yang memiliki kapasitas kelembagaan dan fiskal yang lebih kuat cenderung mampu mengelola anggaran pendidikan secara optimal serta mengembangkan inovasi dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, daerah dengan keterbatasan sumber daya dan anggaran menghadapi berbagai kendala dalam upaya peningkatan mutu sekolah, baik dari aspek sarana prasarana maupun pengembangan kualitas tenaga pendidik.

4. Kesenjangan Digital dan Tantangan Transformasi Pendidikan

Menurut Manuel Castells, dalam konsep network society atau masyarakat jaringan, penguasaan serta akses terhadap teknologi informasi menjadi faktor strategis yang menentukan tingkat daya saing dan posisi sosial suatu kelompok dalam masyarakat. Teknologi tidak lagi sekadar alat bantu, tetapi menjadi struktur yang membentuk relasi ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam bidang pendidikan, ketersediaan dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh langsung terhadap kualitas proses pembelajaran serta memperluas peluang peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kompetensinya. Jika dikaitkan dengan kondisi Indonesia, terutama di wilayah 3T

(tertinggal, terdepan, dan terluar), konsep network society dari Manuel Castells memperlihatkan adanya kesenjangan digital yang cukup signifikan. Akses terhadap internet, perangkat teknologi, serta literasi digital yang belum merata menyebabkan perbedaan kualitas pembelajaran antarwilayah. Sekolah di daerah yang memiliki infrastruktur teknologi memadai dapat memanfaatkan pembelajaran digital, sumber belajar daring, dan inovasi berbasis teknologi secara optimal. Sebaliknya, sekolah di daerah dengan keterbatasan jaringan dan fasilitas teknologi mengalami hambatan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran.

Kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Indonesia menunjukkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya inklusif. Tanpa pemerataan akses internet dan perangkat teknologi, kebijakan digitalisasi pendidikan berpotensi memperlebar kesenjangan mutu.

5. Evaluasi Kebijakan Berbasis Data

Menurut pendekatan evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William N. Dunn, proses evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif guna menilai tingkat efektivitas, efisiensi, serta dampak suatu kebijakan. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian, tetapi juga sebagai dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang. Dalam bidang pendidikan,

evaluasi yang berbasis data menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap intervensi kebijakan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang optimal bagi peserta didik. ((Fathoni et al., 2025) Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal integrasi dan sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Keterbatasan koordinasi serta belum optimalnya sistem informasi yang terintegrasi dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang berbasis bukti (evidence-based policy). ((Kurniansi, 2025) Berdasarkan telaah berbagai teori serta hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditegaskan bahwa pemerataan mutu pendidikan tidak semata-mata ditentukan oleh aspek pembiayaan. Faktor lain seperti kualitas implementasi kebijakan, pemerataan distribusi sumber daya manusia, kapasitas kelembagaan daerah, serta dukungan infrastruktur teknologi juga memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan perlu dirancang secara afirmatif, terintegrasi, dan berbasis data agar mampu merespons persoalan ketimpangan mutu secara komprehensif dan berkelanjutan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa

kebijakan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia telah menunjukkan capaian positif dalam aspek peningkatan akses, terutama melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Kebijakan tersebut terbukti mampu mengurangi hambatan biaya pendidikan dan meningkatkan partisipasi peserta didik, khususnya dari kelompok masyarakat kurang mampu. Namun demikian, peningkatan akses belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan mutu pendidikan. Ketimpangan masih terlihat secara signifikan antara wilayah perkotaan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), terutama dalam aspek distribusi guru, ketersediaan sarana dan prasarana, kapasitas kelembagaan daerah, serta akses terhadap teknologi pendidikan. Implementasi Kurikulum Merdeka juga menunjukkan variasi antarwilayah akibat perbedaan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Dalam perspektif teori keadilan sosial, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif yang berorientasi pada kelompok paling tidak diuntungkan belum berjalan secara optimal. Selain itu, efektivitas kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor implementasi, termasuk komunikasi, ketersediaan sumber daya, struktur birokrasi, dan kapasitas pemerintah daerah dalam sistem desentralisasi. Kesenjangan digital yang masih terjadi turut memperkuat

disparitas mutu pembelajaran, sehingga transformasi digital pendidikan belum sepenuhnya bersifat inklusif. Oleh karena itu, pemerataan mutu pendidikan tidak dapat hanya bertumpu pada kebijakan pembiayaan. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan terintegrasi, meliputi redistribusi dan peningkatan kompetensi guru, penguatan kapasitas kelembagaan daerah, pemerataan infrastruktur teknologi, serta sistem monitoring dan evaluasi berbasis data yang terintegrasi antara pusat dan daerah. Dengan pendekatan afirmatif dan berbasis bukti, kebijakan pendidikan diharapkan mampu mewujudkan pemerataan mutu secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Referensi

- Aniza, K. N. (2023). The Impact of School Attendance on Child Working: Case from Indonesian School Operational Assistance. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 7(1), 100–121.
- Farhatin. (2025). Kesenjangan akses pendidikan digital di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). In *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) eISSN* (Vol. 3).
- Fathoni, W., Wahyudi Nasution, I., Yusup, M., & Asiah, N. (2025). Teori dan Model Analisis Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 03(1).
- Herdiana, Hukum, S., Syariah, E., Gunung, S., & Bandung, D. (2017). Pengaruh komunikasi SDA. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 54–60.
- Iqbal Baihaqi. (2025). *Manajemen Sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran di sekolah menengah*.
- Kurniansi, L. endah rini,eriza saputri,sumitro. (2025). *Evaluasi Kebijakan Merdeka Belajar dari Perspektif Manajemen Pendidikan: Analisis Sistem Pemerintahan Terpadu*.
- Mening subekti.dkk. (2017). *mening subekti.dkk*.
- Nurindah, S., Arsyad, S., & Ahmad, B. (2024). *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal Dinamika Kebijakan dan Implementasi Program Desa Maju: Studi Literatur dan Rekomendasi Kebijakan*. 4(2), 285–295.
- Rizki Ananda Dkk. (2025).
- Syafriani, D., Sahputri, A. A., Alyanti, D., Ramadani, D. S., & Pardosi, K. T. (2025). *JAHE-Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Pembelajaran Kurikulum Merdeka di Indonesia*. 2(1).
- Syamsurijal, S. (2024). Titik Temu Pendidikan dan Pembangunan Sumber

Daya Manusia Berdaya Saing. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 3(03), 545–553. A.Lestari. (2023). *Literasi Digital sebagai Upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital*. 8(3), 167–172.

Hidayat, N. (2024). *Supervisi terhadap peningkatan mutu pembelajaran*. 103–108.

Rahman, A. (2022). *Revitalisasi Peran Guru sebagai Tenaga Pendidik di Era Kurikulum Merdeka*. 1(1), 1–8.

Suryadi.Prof. (2021). *Pendidikan menuju transformasi*. 1–40.

